

ISSN 2828-285x



PERTANIAN, KELAUTAN, DAN BIOSAINS TROPIKA

Vol. 7 No. 4 Tahun 2025

Pendidikan Berbasis Keberagaman: Strategi Kebijakan untuk Karakter Siswa dan Anti-Bullying

Penulis

Siska Nurhalisa¹, Sisca Elfiyani¹, Reni Annisa¹, Muhammad Hafiz Fazli², Adriansyah³, Megawati Simanjuntak⁴

¹ Departemen Manajemen, IPB University

² Program Studi Statistika, Sekolah Statistika dan Sains Data, IPB University

³ Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, IPB University

⁴ Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, IPB University

Pendidikan Berbasis Keberagaman: Strategi Kebijakan untuk Karakter Siswa dan *Anti-Bullying*

Isu Kunci

Policy Brief ini memuat poin-poin penting sebagai berikut :

- 1) Ketidakmerataan fasilitas, pendanaan, serta tenaga pendidik terutama di sekolah swasta serta daerah terpencil.
- 2) Pendidikan karakter yang belum optimal dengan masih tingginya kasus *bullying* dan intoleransi.
- 3) Kurikulum Pendidikan belum sepenuhnya mengintegrasikan nilai multikultural dan keterampilan dalam dunia kerja.
- 4) Kesejahteraan guru, terutama guru honorer yang masih rendah, meskipun beban kerja tinggi.

Ringkasan

Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas, berkeadilan, dan berkarakter. Isu utama meliputi ketidakmerataan fasilitas dan pendanaan, khususnya bagi sekolah swasta dan di daerah terpencil; belum optimalnya pendidikan karakter yang ditandai tingginya kasus *bullying* dan intoleransi; kurikulum yang belum terintegrasi dengan nilai multikultural dan kebutuhan dunia kerja; serta kesejahteraan guru honorer yang masih rendah. Riset membuktikan bahwa pendidikan multikultural, seperti yang diterapkan di SMK Bakti Karya Parigi, efektif membentuk siswa yang lebih toleran dan percaya diri. Namun, penerapannya terhambat oleh kurangnya regulasi, dana, dan fasilitas. Untuk menjawab tantangan tersebut, *policy brief* ini merekomendasikan penguatan pendidikan berbasis keberagaman melalui kesetaraan dukungan bagi sekolah, khususnya sekolah swasta, perluasan program sekolah multikultural, serta penguatan kebijakan *anti-bullying* berbasis sekolah. Pengintegrasian nilai multikultural dan pendidikan karakter ke dalam proses pembelajaran perlu didukung oleh pelibatan masyarakat secara terarah dan peningkatan kesejahteraan guru agar tercipta iklim pendidikan yang inklusif, aman, dan relevan dengan kebutuhan masa kini dan kedepannya. Tanpa kebijakan yang terfokus dan berkelanjutan, upaya membangun generasi emas 2045 yang berkarakter dan menghargai keberagaman akan sulit terwujud.

Kata kunci: Inklusif, karakter, kebijakan, multikultural, pendidikan

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara multikultural yang terdiri atas banyak kelompok, suku, agama, ras, etnis, dan budaya (Wales 2022). Data sensus geografi dan iklim menyatakan bahwa Indonesia memiliki 17.001 pulau. Menurut data dasar angka hasil *Long Form* Sensus Penduduk 2020 (BPS, 2020), Indonesia memiliki lebih dari 1.200 suku bangsa dan 694 bahasa daerah yang tersebar di seluruh wilayah. Negara Indonesia memiliki semboyan Bhineka Tunggal Ika yang bermakna berbeda tetapi tetap satu. Namun, keberagaman di Indonesia yang berkaitan dengan latar belakang, suku, agama, ras, etnis, dan budaya berpotensi menjadi akar terjadinya *bullying*.

Pendekatan berbasis *Diversity, Equity, and Inclusion* (DEI) penting untuk membangun lingkungan pendidikan yang adil dan inklusif sehingga setiap individu merasa dihargai tanpa diskriminasi (Arsel *et al.*, 2022). Penerapan DEI dalam sistem pendidikan terbukti mampu meningkatkan refleksi, kolaborasi, dan pemerataan kesempatan belajar bagi seluruh peserta didik (Ravenna *et al.* 2022).

Pendidikan karakter yang efektif tidak hanya mengajarkan nilai moral, tetapi menekankan integrasi antara nilai kejujuran, tanggung jawab, serta empati dalam setiap proses pembelajaran (Mahanani *et al.* 2022). Kurangnya pendidikan karakter dapat menyebabkan berbagai masalah sosial, termasuk meningkatnya kasus intoleransi dan diskriminasi di lingkungan sekolah (Julaeha 2019). Riset Mashabi dan Prastiwi (2024) melaporkan terdapat sebanyak 573 kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan, termasuk sekolah, madrasah, dan pesantren. Kasus ini mengalami lonjakan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dengan 31% kasus terkait perundungan.

Pendidikan karakter di Indonesia menekankan lima nilai utama, yaitu religiusitas, nasionalisme, gotong royong, kemandirian, dan integritas yang diintegrasikan ke dalam kurikulum dan budaya sekolah (Mahanani *et al.* 2022). Namun,

pendidikan karakter di Indonesia masih belum efektif dan tumpang tindih, seperti pada pelajaran yang berisi pesan moral yaitu, Pendidikan Kewarganegaraan dan Pancasila (Julaeha, 2019). Krisis karakter di Indonesia terlihat dari meningkatnya kasus *bullying*, narkoba, dan perilaku menyimpang di kalangan pelajar yang menunjukkan bahwa pendidikan dalam membentuk karakter siswa belum optimal (Jati 2023).

Pendidikan multikultural merupakan upaya yang dilakukan secara sadar untuk mempelajari berbagai status sosial, ras, suku, dan agama dengan tujuan untuk menciptakan kepribadian yang cerdas dalam menghadapi masalah keberagaman budaya baik di dalam maupun luar sekolah (Amin 2018). Pendidikan multikultural dapat menjadi salah satu strategi preventif untuk menciptakan karakter siswa. Namun, pendidikan multikultural belum banyak diterapkan di Indonesia dan belum ada peraturan pemerintah atau regulasi yang mengatur penerapan kurikulum tersebut. Tanpa adanya regulasi yang jelas, kurikulum nasional tidak mampu untuk menjawab krisis karakter dan *bullying*. Ketiadaan payung hukum dan pedoman yang jelas menjadi salah satu akar masalah, sehingga riset ini dan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan menjadi sangat krusial untuk mendorong perubahan sistemik. Maka dari itu diperlukan pembaruan peraturan pemerintah yang mengatur mengenai implementasi pendidikan multikultural di Indonesia untuk menjawab tantangan kenakalan remaja dan krisis karakter yang semakin kompleks. Tanpa intervensi kebijakan yang tepat dan cepat untuk memperkuat pendidikan karakter dan multikultural, bangsa ini berisiko kehilangan momentum untuk menyiapkan generasi penerus yang tidak hanya terampil tetapi juga berkarakter, yang merupakan pilar fundamental bagi kesuksesan Indonesia Emas 2045.

Pembahasan

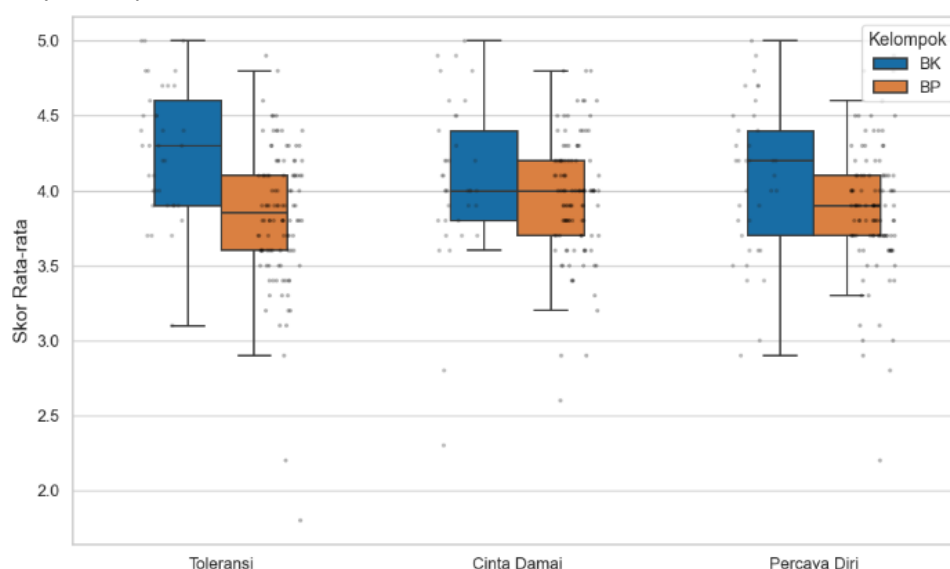
Di lapangan, terdapat dua sekolah yang menjadi titik perhatian. SMK Bakti Karya Parigi merupakan sekolah terakreditasi B di Pangandaran yang didirikan pada tahun 2011 dan dikelola oleh

Yayasan Bakti Karya sejak 2015. Sejak saat itu, sekolah ini mengembangkan kelas multikultural dengan visi keberagaman. Selain menerapkan kurikulum merdeka, sekolah ini mengintegrasikan program multikultural seperti beasiswa multikultural, *peace generation*, dan pandu. Sedangkan SMK Bina Profesi Bogor merupakan sekolah terakreditasi B di Bogor yang berdiri sejak 1999 di bawah Yayasan Bina Profesi. Sekolah ini masih menggunakan sistem pendidikan konvensional, yaitu kurikulum merdeka tanpa adanya modifikasi. Perbedaan ini bukan hanya soal pendekatan, tetapi juga tercermin nyata dalam karakter dan sikap siswa.

Hasil pengukuran menunjukkan perbedaan yang konsisten pada tiga indikator utama karakter anak sebagaimana dikemukakan Megawangi (2004) dalam buku Pendidikan Karakter: Solusi yang tepat untuk membangun bangsa, yaitu karakter toleransi, cinta damai, dan percaya diri. Pertama, toleransi siswa SMK Bakti Karya Parigi lebih tinggi dibanding SMK Bina Profesi Bogor. Hal ini tampak dari sikap siswa SMK Bakti Karya Parigi yang lebih terbuka terhadap perbedaan dan lebih mampu menerima keberagaman di lingkungan sekolah. Kedua, cinta damai pada kedua sekolah tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Hal ini memperlihatkan bahwa meskipun pendekatan kedua sekolah berbeda, keduanya tetap berhasil menanamkan

nilai penting untuk menjaga keharmonisan di lingkungan sekolah. Ketiga, percaya diri siswa SMK Bakti Karya Parigi lebih tinggi dibanding siswa SMK Bina Profesi Bogor. Siswa SMK Bakti Karya Parigi tampak lebih berani dalam mengemukakan pendapat dan lebih siap untuk menghadapi tantangan.

Temuan ini menunjukkan bahwa pendidikan multikultural efektif dalam membentuk siswa yang lebih toleran, percaya diri, dan siap menghadapi keberagaman. Namun, faktanya penerapan pendidikan multikultural belum menjadi praktik umum. Sebagian besar sekolah masih bergantung pada pendekatan konvensional karena tidak ada regulasi yang secara tegas mewajibkan integrasi nilai multikultural dalam kurikulum. Kurikulum nasional yang ada saat ini belum secara eksplisit mendorong praktik pendidikan berbasis keberagaman sebagai budaya sekolah. Pendekatan yang diterapkan SMK Bakti Karya Parigi selaras dengan prinsip DEI karena secara aktif mengelola keberagaman siswa. Sebaliknya, SMK Bina Profesi Bogor yang cenderung homogen tetap memiliki potensi terjadinya konflik, seperti kasus yang pernah terjadi pada tahun 2021 di sekolah tersebut. Oleh karena itu, penguatan nilai toleransi dan pencegahan perundungan tetap diperlukan di seluruh sekolah.



Gambar 1 Distribusi Skor per Variabel

Selain faktor kurikulum, perbedaan ini juga diperkuat oleh ketidakmerataan fasilitas dan pendanaan. Sekolah swasta kecil seperti SMK Bakti Karya Parigi dan SMK Bina Profesi Bogor kerap menghadapi keterbatasan dana operasional, sarana prasarana yang kurang memadai, serta kurangnya kesejahteraan tenaga pendidik. Hasil dari *Focus*

Group Discussion (FGD) dengan pihak sekolah pun menegaskan bahwa guru honorer masih menerima kesejahteraan rendah meskipun menanggung beban kerja tinggi, yang berimbas pada mutu pembelajaran. Keterbatasan ini membatasi kemampuan sekolah untuk berinovasi maupun membangun pendidikan multikultural.



Gambar 2 Kondisi Pembelajaran dalam Ruang Kelas SMK Bakti Karya Parigi
Sumber: Dokumentasi pribadi (2025)



Gambar 3 Kondisi Pembelajaran dalam Ruang Kelas SMK Bina Profesi Bogor
Sumber: Dokumentasi pribadi (2025)



Gambar 4. Fasilitas Perpustakaan SMK Bakti Karya Parigi
Sumber: Dokumentasi, 2025



Gambar 5. Fasilitas Perpustakaan SMK Bina Profesi Bogor
Sumber: Dokumentasi, 2025

Kondisi dua sekolah tersebut menggambarkan persoalan nasional yang lebih luas: Tingginya angka *bullying* dan intoleransi, kesenjangan antar sekolah negeri dan swasta, serta rendahnya kesejahteraan guru honorer. Regulasi yang ada, seperti Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2003 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 20 Tahun 2018, belum sepenuhnya menjawab persoalan ini. Tanpa dukungan kebijakan yang kuat, kesenjangan antar sekolah akan terus melebar, dan tujuan

membentuk generasi muda yang toleran, inklusif, dan berkarakter sulit tercapai.

Rekomendasi

1. Pendidikan nasional Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, berkeadilan, dan berkarakter. Beberapa regulasi utama yang mengatur hal tersebut antara lain:

2. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Permendikbud No. 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal;
4. Peraturan Pemerintah (PP) No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) No. 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.

Berdasarkan analisis terhadap tantangan di lapangan dan memperkuat implementasi dari regulasi yang berlaku, berikut adalah rekomendasi kebijakan yang dirumuskan:

1. Peningkatan Kesetaraan Perlakuan terhadap Sekolah Swasta

Pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang memastikan kesetaraan antara sekolah swasta dan negeri, baik dalam hal alokasi anggaran, bantuan sarana prasarana, maupun akses terhadap program pemerintah. Hal ini sejalan dengan semangat UU Sisdiknas Pasal 11 ayat (1) tentang hak setiap peserta didik untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Kebijakan ini akan memperkuat peran sekolah swasta sebagai mitra strategis dalam memajukan pendidikan nasional dan memastikan terpenuhinya hak-hak peserta didik di semua jenis sekolah.

2. Perluasan Program Sekolah Multikultural

Program sekolah multikultural perlu diperluas dan diintegrasikan dalam kurikulum serta kegiatan ekstrakurikuler. Hal ini bertujuan untuk memperkaya pemahaman kebhinekaan, membangun toleransi, serta mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045 melalui generasi yang berkarakter, cerdas, dan mencintai keberagaman. Program ini merupakan operasionalisasi dari Permendikbud No. 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.

3. Penguatan Kebijakan *Anti-Bullying* Berbasis Sekolah

Tingginya angka perundungan di lingkungan pendidikan menunjukkan perlunya

kebijakan *anti-bullying* yang lebih tegas, terintegrasi, dan berbasis sekolah. Pemerintah perlu mendorong satuan pendidikan untuk memiliki regulasi internal yang jelas terkait pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban *bullying*, yang selaras dengan prinsip perlindungan anak dan penguatan pendidikan karakter. Kebijakan ini perlu dilengkapi dengan mekanisme pelaporan yang aman, program pendampingan psikososial, serta pelatihan guru dalam mendeteksi dan menangani perilaku perundungan. Pendekatan preventif melalui pendidikan multikultural dan nilai-nilai keberagaman menjadi kunci utama dalam menciptakan iklim sekolah yang aman, inklusif, dan bebas kekerasan.

4. Penerbitan Panduan Nasional Pelibatan Masyarakat

Kementerian Pendidikan Dasar dan menengah (Kemendikdasmen) didorong untuk mengeluarkan panduan nasional tentang mekanisme pelibatan masyarakat (seperti orang tua, komite sekolah, dan tokoh masyarakat) dalam pengawasan dan pendampingan peserta didik. Panduan ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem pendidikan yang kolaboratif dan mendukung pembentukan karakter siswa, selaras dengan prinsip dalam Standar Proses (Permendikbudristek No. 16 Tahun 2022).

5. Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Keragaman

Pendidikan karakter perlu diperkuat dengan pendekatan berbasis keragaman, sehingga nilai religiusitas, nasionalisme, gotong royong, kemandirian, dan integritas tidak diajarkan secara abstrak, tetapi dikontekstualisasikan dalam realitas multikultural peserta didik. Penguatan ini dapat dilakukan melalui pembelajaran berbasis proyek, kegiatan ekstrakurikuler, serta praktik kehidupan sekolah yang mencerminkan penghormatan terhadap perbedaan. Dengan pendekatan ini, pendidikan karakter tidak lagi bersifat tumpang tindih atau simbolik, melainkan menjadi pengalaman belajar yang bermakna dan transformatif bagi siswa.

6. Peningkatan Kesejahteraan Guru melalui Regulasi Daerah

Pemerintah Daerah, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota, diharapkan dapat menetapkan peraturan lokal yang secara khusus mengatur pemberian honorarium yang layak dan peningkatan kesejahteraan bagi guru di wilayahnya. Kebijakan ini penting untuk menjamin keberlangsungan proses pembelajaran yang berkualitas sesuai Standar Nasional Pendidikan (PP No. 57 Tahun 2021) dan mendukung kesejahteraan tenaga pendidik sebagai ujung tombak pendidikan.

Kesimpulan (Kritik pada kebijakan saat ini)

Kebijakan pada dunia pendidikan di Indonesia saat ini belum mampu secara sistemik menjawab krisis karakter dan tingginya angka perundungan (*bullying*) yang acapkali terjadi di lingkungan sekolah. Berdasarkan hasil turun lapang, masih terdapat berbagai permasalahan yang menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pemerintah belum optimal, meskipun telah ada regulasi seperti UU No. 20 Tahun 2003, PP No. 57 Tahun 2021, Permendikbud No. 20 Tahun 2018, dan Permendikbudristek No. 16 Tahun 2022.

Sebagian besar sekolah di Indonesia saat ini masih bergantung pada pendekatan konvensional, dimana pendidikan karakter di Indonesia masih jarang diintegrasikan dengan keberagaman yang membuat siswa kurang memahami secara kontekstual terkait nilai religiusitas, nasionalisme, gotong royong, kemandirian, dan integritas. Belum adanya regulasi yang tegas atau peraturan pemerintah terkait pendidikan karakter berbasis keberagaman menjadi tantangan yang nyata dalam menjawab krisis karakter siswa.

Tumpang tindih yang terjadi dalam mata pelajaran tertentu juga membuat kurikulum nasional kurang memberikan pengalaman belajar yang transformatif bagi siswa dalam menghargai perbedaan. Kondisi ini berdampak pada masih tingginya kasus intoleransi dan diskriminasi di lingkungan sekolah yang terindikasi *bullying*.

Kebijakan saat ini belum sepenuhnya menjamin hak peserta didik dan guru, dimana terdapat beberapa sekolah swasta yang masih menghadapi keterbatasan guru agama non-Muslim, kerja sama dengan pihak eksternal yang belum optimal, serta ketidakmerataan pendanaan. Hal ini mengakibatkan meningkatnya beban operasional yang ditanggung oleh pihak yayasan, guru, dan peserta didik. Oleh karena itu, peningkatan kesetaraan perlakuan terhadap sekolah swasta menjadi prioritas kebijakan untuk menjamin akses pendanaan, bantuan sarana prasarana, dan kesempatan yang sama dalam berbagai program pemerintah sesuai amanat UU Sisdiknas Pasal 11 ayat (1). Lalu, terkait pelaksanaan pendidikan karakter yang diatur dalam Permendikbud No. 20 Tahun 2018 juga masih lemah yang terlihat dari rendahnya keterlibatan keluarga dan masyarakat dalam mengawasi pergaulan dan mendukung pembentukan karakter siswa. Oleh karena itu, perlu segera dilakukan penerbitan panduan nasional pelibatan masyarakat sehingga dapat memperkuat kolaborasi tripusat pendidikan (sekolah, keluarga, dan masyarakat).

Selanjutnya, kurikulum di beberapa SMK juga masih belum terintegrasi dengan kebutuhan dunia usaha dan industri sehingga banyak lulusan SMK yang masih kurang siap bersaing di pasar kerja yang semakin kompetitif. Oleh karena itu, perlu adanya perluasan program sekolah multikultural sekaligus integrasi kurikulum berbasis dunia kerja agar pembelajaran lebih relevan, kontekstual, dan menanamkan nilai kebhinekaan sebagai modal sosial menuju Indonesia Emas 2045. Selain itu, kesejahteraan guru terutama guru honorer yang masih jauh dari standar layak kehidupan, sementara beban kerja administrasi dan tuntutan profesionalisme semakin meningkat. Terakhir, masih terjadinya kesenjangan fasilitas digital terutama di sekolah swasta dan daerah terpencil yang menghambat pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia.

Secara keseluruhan, permasalahan yang ditemukan di lapangan menunjukkan bahwa

kebijakan yang ada saat ini belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan yang ada dalam dunia pendidikan. Lemahnya integrasi keberagaman dalam pendidikan, ketidakmerataan dalam skema pendanaan, rendahnya keterlibatan keluarga dan masyarakat, ketidakmerataan fasilitas digital, serta lemahnya dukungan terhadap kesejahteraan para guru menunjukkan bahwa kebijakan pada dunia pendidikan saat ini perlu dilakukan pengintegrasian pendidikan karakter berbasis keberagaman dengan disertai pemerataan sehingga semua peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas.

Daftar Pustaka

- Amin M. 2018. Pendidikan multikultural. *Jurnal Kajian Islam Kontemporer*. 9 (1).
- Arsel Z, Crockett, D. dan Scott, M.L. 2022. Diversity, equity, and inclusion (DEI) in journal of consumer research: a curation and research agenda. *Journal of Consumer Research*. 48.
- [BPS] Badan Pusat Statistik Indonesia. 2020. *Profil Suku dan Keragaman Bahasa Daerah Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020*. BPS. Jakarta.
- Jati NNS. 2023. Krisis pendidikan karakter di Indonesia.
- Julaeha S. 2019. Problematika kurikulum dan pembelajaran pendidikan karakter. *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*. 7 (2).
- Mahanani P, Akbar S, Kamaruddin, B.Y.A. dan Hussin, B.Z. 2022. Educational analysis to develop character in Malaysia and Indonesia. *International Journal of Instruction*. 15 (3):377-392.
- Mashabi S. Prastiwi M. 2024. *JPPI: Ada 573 Kasus Kekerasan di Sekolah Sepanjang Tahun 2024*. URL: <https://www.kompas.com/edu/read/2024/12/29/172111171/jppi-ada-573-kasus-kekerasan-di-sekolah-sepanjang-tahun-2024>. Diakses tanggal 30 Januari 2025.
- Megawangi R. 2004. *Pendidikan Karakter Solusi yang Tepat untuk Membangun Bangsa*. Jakarta: Indonesia Heritage Foundation.
- Ravenna AP, Wheat S, Rayess EF, Mccrea L, Martonffy IA. 2022. Diversity, equity, and inclusion milestones: creation of a tool to evaluate graduate medical education programs. *Journal of Graduate Medical Education*.
- Wales R. 2022. Pendidikan multikultural di Indonesia. *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*. 1 (1):1-25.

Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika merupakan upaya mengantarmukakan sains dan kebijakan (science-policy interface) untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang inklusif. Media ini dikelola oleh Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik (D-KASRA) IPB University. Substansi policy brief menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya dan tidak mewakili pandangan IPB University.

Author Profile



Siska Nurhalisa, adalah mahasiswa semester 7 IPB University di departemen Manajemen. Berada pada peminatan Manajemen Sumber Daya Manusia. Kegiatan sehari-hari diisi riset dan penyusunan tugas akhir.
(Corresponding Author)
Email: siskanurhalisa@gmail.com



Reni Annisa, merupakan mahasiswa semester 7 IPB University departemen Manajemen. Berada pada peminatan Manajemen Pemasaran. Kegiatan sehari-hari diisi dengan riset, magang, dan proyek akhir.



Siska Elfiyani, merupakan mahasiswa aktif semester 7 departemen Manajemen di IPB University. Berada pada peminatan Manajemen Produksi dan Operasi. Kegiatan sehari-hari diisi dengan riset, magang, dan proyek akhir.



Muhammad Hafiz Fazli, merupakan mahasiswa aktif semester 5 IPB University program studi Statistika dan Sains Data. Kegiatan sehari-hari diisi dengan kegiatan perkuliahan, himpunan profesi Gamma Sigma Beta, dan studi mandiri.



Adriansyah, merupakan mahasiswa aktif semester 5 departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat di IPB University. Berada pada peminatan Tata Kelola Sumberdaya Alam dan Lingkungan. Kegiatan sehari-hari diisi dengan riset, perkuliahan, dan Badan Eksekutif Mahasiswa FEMA.



Megawati Simanjuntak, merupakan dosen di IPB University khususnya di departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen. Selain aktif sebagai dosen, juga aktif sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni Fakultas Ekologi Manusia. Memiliki minat pada perilaku konsumen, perlindungan konsumen, dan pemberdayaan konsumen.

ISSN 2828-285X



9

772828

285006



Telepon

+62 811-1183-7330



Email

dkasra@apps.ipb.ac.id



Alamat

Gedung LSI Lt. 1
Jl. Kamper Kampus IPB Dramaga
Bogor - Indonesia 16680